

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap partai politik di Indonesia sehingga sulit bagi politik untuk bergerak maju dalam mewujudkan kinerjanya. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2019 ternyata menimbulkan dampak tidak hanya pada kehidupan masyarakat secara kesehatan, ekonomi maupun masalah pendidikan. Selain masalah instruktif ini terdampak juga terhadap aktivitas-aktivitas kegiatan kepartaian.

Dampak secara umum yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 terhadap partai politik mengarah pada beberapa kegiatan yang notabnya menjadi menurun sehingga partai politik kurang memiliki rasa eksis dimata masyarakat. Adanya undang-undang pandemi yang mengatur pembatasan aktivitas berkerumun telah memberikan dampak tersebut. Akibatnya, peran dan fungsi partai kurang efektif dijalankan di masa pandemi. Tidak hanya itu, kasus ini juga mempengaruhi perspektif internal dan eksternal partai. Termasuk juga pengaruh terhadap kegiatan yang mengarah pada keberadaan partai politik di masyarakat, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus tidak terlepas dari hal tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus tidak tinggal diam dalam situasi ini karena Partai Kebangkitan Bangsa Kudus terus berupaya menerapkan strategi untuk memastikan lembaganya tetap eksis di masa pandemi Covid-19. Sehingga penerapan strategi ini dapat mencapai revitalisasi pada lembaganya.

Partai politik atau yang disingkat dengan parpol menurut para ahli merupakan suatu kelompok warga negara yang anggota-anggotanya terbentuk secara organisasi yang memiliki arah, kualitas, dan tujuan yang sama dalam melaksanakan kebijakan umum mereka. Maksud atas kelompok ini ialah mengarah pada suatu kedaulatan politik dan memiliki tujuan saling merebut kedaulatan politik menggunakan konsitusional akan dapat menjalankan programnya. Partai politik juga menjadi badan publik karna sejatinya partai politik merupakan Lembaga yang dimiliki oleh publik dan secara jelasnya tugasnya adalah melayani kepentingan umum untuk memperjuangkan dan

melindungi kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara untuk kepentingan umum.¹

Peran partai politik dalam demokrasi sangat penting. Akuntabilitas pendidikan politik kepada calon kader dan masyarakat luas merupakan salah satu tujuan pembangunan parpol.² Partai politik merupakan sarana pilihan rakyat untuk mencapai nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, partai politik pada umumnya harus menjalankan peran dan fungsinya dalam rangka menciptakan negara yang demokratis, namun dalam praktiknya, tidak semua tugas tersebut dipenuhi oleh partai politik yang ada saat ini. Mengingat pentingnya partai politik, bahkan kehadiran dan keefektifannya menjadi barometer kemajuan demokrasi suatu bangsa. Meski bukan sebagai pelaksana pemerintahan, kehadirannya akan berdampak pada bagaimana dan di mana pelaksanaan pemerintahan itu dilakukan.³

Partai politik tidak hanya berperan dalam proses politik, tetapi juga berperan penting pascabencana alam atau masalah sosial seperti pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Rakyat yang diwakili oleh anggotanya yang duduk di legislatif dan eksekutif, bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Di sisi lain, warga negara harus dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah melalui partai politik.

Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia terdeteksi positif berawal pada tanggal 2 maret 2020. dan pada tanggal 9 april 2020 kasus pandemi ini telah menyebar ke 34 provinsi yang telah mengancam kesehatan rakyat dan tentunya sangat mempengaruhi proses pelaksanaan daerah yang melibatkan banyak pihak serta memicu kerumunan.⁴ Sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden menganjurkan serta mengingatkan masyarakat untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak sehingga Presiden mengeluarkan sebuah kebijakan.

¹ Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi Dan Partai Politik," *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 56–80.

² Agung Prase, "Demokrasi Di Indonesia Saat Ini," 2012, 17–36.

³ Thomas Meyer, "Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis," *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 2012, 1–46.

⁴ Simela Victor Muhamad, "Di Dunia," 2021.

Mengingat terlalu cepatnya penyebaran wabah yang sangat membahayakan tersebut, melalui kekuasaannya yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 yang berlaku mulai 31 Maret tentang penetapan kedaruratan kesehatan.⁵

Pandemi yang terjadi sangat cepat ini juga merubah kondisi politik di Indonesia dengan membawa arus baru bagi perpolitikan Indonesia. Tidak hanya terjadi pada pelaksanaan Pilkada saja lebih jauh dari itu peta hubungan antara partai politik pendukung pemerintah dengan partai politik oposisi juga berubah. Dengan adanya pandemi bagi beberapa partai politik menjadi kondisi dimana dapat mengevaluasi ulang arah dan kebijakan politik.

Selama masa pandemi, partai politik harus membantu pemerintah memerangi pandemi Covid-19. Pemerintah bukan satu-satunya entitas yang harus menangani masalah ini. Partai politik menjadi lebih aktif dalam menunjukkan upayanya memerangi Covid-19 dan membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi ini sebagai akibat dari pertanyaan yang diajukan tentang perannya di masyarakat. Kandidat yang mencari kursi parlemen bahkan selama wabah Covid-19 sejauh ini telah menyumbangkan uang, bantuan makanan, lencana partai, dan berbagai dukungan lainnya.

Merujuk pada pemeriksaan hukum tata negara keadaan darurat bencana, proses penetapan keadaan darurat ini tetap dalam lingkup *staatsnoodrecht*, yang mengatur bahwa negara wajib melaksanakan rencana tanggap darurat. Implementasi kebijakan tersebut tercermin dari pemberlakuan pembatasan sosial yang luas, yang meliputi pembatasan yang mulai diberlakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Agenda perogram kerja Politik juga mengalami dampak yang sangat signifikan karena dari wabah pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi sistem politik yang menyebabkan

⁵ Salma Nurul Ranisya and Indah Dwiprigitaningtias, "Kebijakan Presiden Dalam Menangani Perekonomian Indonesia Saat Pandemi Covid 19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–18, <http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/507>.

pemberintahan sementara waktu dalam peroses legislatif, kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang dalam peroses perpolitikan. Dampak umum dari timbulnya kasus pandemi Covid-19 ini kepada politik memiliki potensi yang besar yang menjadikan proses sosial politik di wilayah-wilayah terdapat hambatan.

Menurut Prakoso Aji (2020) terdapat beberapa alasan berubahnya konstelasi politik di masa pandemi, yaitu ekosistem politik yang berubah karna pandemi dapat ditandai dengan menonjolnya peran pemerintah sebagai penanganan utama dalam kasus Covid-19.⁶ Pada setiap krisis yang ada, atas nama memulihkan kondisi krisis pemerintah dalam melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Selain itu juga pemerintah memiliki hak untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk dipakai dalam kepentingan bersama agar dapat mengeluarkan kondisi negara dari kondisi kritis. Oleh karena itu, dengan lingkungan politik yang seperti ini akan sangat terasa sekali bagaimana penguatan peran dan kedudukan pemerintah menjadi salah satu yang tidak dapat dipungkiri. Tidak hanya itu, alasan lainnya juga adanya rasa membangun benteng kesiapsiagaan atau adanya kesamaan nasib. Segenap lapisan bangsa dituntut harus bersama-sama untuk melawan pandemi ini dan atas perasaan ini perbedaan-perbedaan politik harus disampingkan terlebih dahulu. Bahkan beberapa petinggi partai politik yang berada pada posisi di luar pemerintah juga seringkali menyatakan sikap persatuan dan mengajak masyarakat untuk bersatu dalam hal penanganan Covid-19. Dengan begitu, adanya pandemi justru menjadikan hubungan antar partai politik semakin cair dan lebih mudah untuk terciptanya konsensus-konsensus politik di masa pandemi Covid-19.⁷

Terkait implikasi wabah Covid-19 yang dialami partai politik secara Nasional cenderung pada permasalahan dalam tataran pemilu pada tahun 2020, Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) menunda penyelenggaraan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah

⁶ Arif Wicaksana, "Peran Partai Politik Di Tengah Pandemi Covid-19: Potensi Meningkatkan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Pada Partai Gerindra Di DPC Gerindra Kota Tangerang).," *Https://Medium.Com/*, 2016, 1, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁷ Imam Wahyudi, "Pandemi Covid, Revolusi Digital Dan Keberlanjutan Jurnalisme Berkualitas," *Jurnal Dewan Pers* 22, no. July (2021): 55–75.

pada 2020. Pemungutan suara semula dijadwalkan 23 September 2020 yang pada akhirnya terlaksana pada 9 Desember 2020, namun pemerintah belum membuat keputusan. Keputusan tentang apakah epidemi akan berakhir atau tidak. Isu ini berdampak pada partai politik di bidang-bidang berikut: Pertama, munculnya fenomena partai tunggal menunjukkan adanya perilaku non-kompetitif yang merugikan esensi demokrasi berbasis representasi, dan hampir identik dengan fenomena calon tunggal. Kedua, tingginya angka golput dalam Pilkada serentak menunjukkan bahwa fungsi sosialisasi partai politik telah gagal, sehingga tidak terbentuk party id.⁸

Tabel 1.1. Angka Partisipasi dan Golongan Putih Pilkada Serentak

No	Penyelenggara Pilkada	Jumlah Daftar Pemilih	Hak Pilih Sah	Golongan Putih (Golput)
1.	Kota Medan	1.635.846	748.882	623.052
2.	Depok	1.231.512	590.317	641.195
3.	Tangerang	976.019	570.708	405.311
4.	Bali	444.929	240.261	204.668
5.	Badung	362.950	308.507	54.443
6.	Tabanan	362.813	293.878	68.935
7.	Bangli	188.924	156.806	32.188
8.	Karangasem	375.063	266.294	108.769
9.	Jemberan	236.746	184.667	52.085

Sumber: merdeka.com “Deretan Pangung Pilkada Dimenangkan Golput”

Ketiga, adanya asal-usul fenomena calon independen, membutuhkan kebijakan untuk memaksa semua pihak partai politik berpartisipasi dalam pencalonan calon. Keempat, Munculnya fenomena kartelisasi yang dimaksud dengan menjadikan Kerjasama antar partai politik yang memiliki posisi didalam pemerintah dalam mengendalikan dan mewujudkan

⁸ Angga Yuniar, “Deretan Pangung Pilkada Dimenangkan Oleh Golput,” m.merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-panggung-pilkada-dimenangkan-golput.html>.

kepentingan-kepentingan mereka. Dalam pilkada sudah menunjukkan bahwa perilaku partai tidak lagi didorong oleh ideologi melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis.⁹ Di Kabupaten Kudus khususnya pada Partai Politik tidak mengalami gejala seperti halnya masalah yang dialami partai di daerah lain. Karna pada masa Pilkada serentak tidak terlaksana di Kabupaten Kudus.

Partai Kebangkitan Bangsa bahkan telah menyusun program kerja khusus untuk memerangi Covid-19 dan menyampaikan instruksi secara resmi. Melalui ketua umumnya Drs. Ilwani, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan anggota partai untuk turut serta memutus mata rantai Covid-19. Langkah-langkah yang diambil para pihak tentu patut dipuji, tetapi ada beberapa peringatan yang harus diperhatikan. Misalnya, meski dengan arahan langsung partai dan rencana khusus Covid-19, Kegiatan yang diselesaikan masih terlihat belum terstruktur. Persepsi bahwa upaya partai untuk masuk ke masyarakat terus bergantung pada inisiatif perangkat daerah atau kader, sehingga partai pada akhirnya tidak membantu semua daerah. Hal ini jelas sangat disayangkan mengingat partai politik organisasi yang berakar di semua provinsi dan kepengurusannya tumbuh dari desa/kelurahan. Sebuah partai harus bisa berbuat lebih sebagai organisasi politik yang besar.¹⁰

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat prihatin dengan pandemi Covid-19 karena kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah. Sehingga partai politik memiliki peluang potensial untuk menunjukkan presentasinya sejauh penegasan terbuka sehingga citra partai akan meningkat di mata publik dan struktur polarisasi wilayah lokal sesuai dengan konstituennya, partai diharapkan dapat mengikuti konstituennya dan mempertahankan kerinduan daerah secara umum untuk dimanfaatkan sebagai modal masa depan ketika dalam persaingan ras politik, konstituen akan memberikan keyakinan tanpa batas. Di tengah pandemi Covid-19, parpol memegang peranan penting,

⁹ Ahmad Zaki Fadlurrohman, "Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam," 2018, 16–30.

¹⁰ Priska Sari Pratiwi, "PKB: Pilkada Di Tengah Pandemi Hanya Untungkan Petahana," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201023112621-32-561896/pkb-pilkada-di-tengah-pandemi-hanya-untungan-petahana), 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201023112621-32-561896/pkb-pilkada-di-tengah-pandemi-hanya-untungan-petahana>.

salah satunya mengontrol undang-undang dan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus.

Hambatan yang dihadapi pada masa pandemi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada proses komunikasi politik. Komunikasi dengan masyarakat, komunikasi antar fraksi di DPRD dan komunikasi dengan pihak eksekutif mengalami hambatan. Masalah hambatan pada agregasi dan artikulasi terlihat dalam kepentingan masyarakat masih berpusat pada permasalahan anggaran, yang menjadikan usulan yang disampaikan masyarakat belum bisa terealisasi semua. Tidak semua usulan yang disampaikan dapat terealisasi. Begitu juga dengan usulan fraksi-fraksi. Untuk mengimplementasikan rancangan peraturan dari berbagai fraksi tersebut, diperlukan skala prioritas agar nantinya dari apa yang telah terprogram dapat berjalan dengan baik.¹¹

Partai kebangkitan bangsa (PKB) Kabupaten Kudus mengalami polemik yang tidak jauh berbeda dengan beberapa partai yang lain. Polemik yang terjadi di partai PKB mengarah pada pemberhentian kegiatan yang bersifat tatap muka, pemberhentian kegiatan itu di disampakan oleh pimpinan DPC PKB mengingat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang perlu ditaati sehingga kegiatan partai PKB hanya bisa bekerja mengikuti sesuai aturan pandemi.¹²

Bentuk pendekatan Partai Politik kepada masyarakat secara umum yaitu menjalankan pendekatan dengan mengikuti arus perubahan masyarakat. Kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu progam yang dijalankan oleh beberapa partai politik, fenomena itulah yang menjadi progam kerja partai politik. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kudus lebih memprioritaskan pada kepedulian terhadap masyarakat sehingga dapat direalisasikan dengan baik hal itu yang menjadikan tetap hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mendampingi dan berperan dalam menghadapi tantangan dan efek pandemi Covid-

¹¹ Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus, "Pola Komunikasi Politik: Dpc Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Kabupaten Kudus," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 3, no. 2 (2022): LAYOUTING, <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.11762>.

¹² Wawancara dengan Ilwani sebagai Sekertaris dewan syura dan sebagai Demisioner Wakil Ketua DPRD Kudus.

19 dimasyarakat. Bentuk peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menjalankan keperdulian masyarakat yaitu; Do'a bersama dan santunan yatim piatu, bantuan sosial, dan salurkan bantuan mengurus jinazah akibat terpapar Covid-19.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini berusaha untuk memahami lebih mendalam mengenai “Revitalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus pada Masa Pandemi”. Acuan awal dalam memahami ini diawali dengan melihat bagaimana dampak yang terjadi Pada Partai Kebangkitan Bangsa pada masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kudus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis “Revitalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus di masa Pandemi Covid-19”. Dalam Penelitian ini lebih mengarah kepada upaya partai politik mempertahankan eksistensinya mempertahankan kepartaian dimasa pandemi Covid-19 dimasyarakat menjadi subjek penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Lingkup masalah yang akan diteliti adalah pertanyaan yang muncul dari konteks masalah. Berdasarkan indeks masalah, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut setelah latar belakang sebelumnya:

1. Bagaimana Dampak Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Strategi Revitalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam melakukan penelitian mengacu pada tujuan penyelidikan peneliti terhadap rumusan masalah di atas. Berikut ini konteks dan definisi masalah menjadi dasar untuk tujuan penelitian berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kinerja Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam mencapai Revitalisasi pada masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian ini, dimaksud agar temuan tersebut dapat memberikan gambaran terhadap partai politik dalam menjalankan peran dan fungsi dimasa pandemi sehingga eksistensi kepartaian tetap berjalan dengan baik

Studi ini dimaksudkan untuk memiliki implikasi teoretis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang polemik yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus dimasa pandemi Covid-19. Dan penelitian ini dimaksud untuk memberikan manfaat baik bagi partai politik dan masyarakat umum.
 - b. Kemungkinan penelitian ini akan mengarah pada penyelidikan lebih lanjut. Topik yang sama dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan menyoroti masalah yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini akan menjadi alat yang bermanfaat dalam mempraktekkan pengetahuannya tentang Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus selama masa pandemi Covid-19.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan diskusi tentang peran dan fungsi partai politik agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal yang akan disusun oleh peneliti dibagi menjadi

1. Bagian awal
Di awal Bagian ini termasuk cover
2. Bagian isi
Bagian Isi Bagian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan penjelasannya tidak terlalu luas.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang Kajian Teori, Penelitian Sebelumnya, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, pengumpulan data, penyampaian validitas data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian pada bab ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

